

STRATEGI GURU DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISWA

**Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa¹, Fari Saputra Ndruru², Asnah Yanti Gulo³,
Krisman Driawan Nazara⁴, Rafiq Rahman Zebua⁵, Ardius Zai⁶, Teto
Wirawan Mendrofa⁷, Salfian Aziz Aceh⁸, Agustomy Arianto Nazara⁹**

¹Universitas Nias. E-Mail: hendrikusharefa@unias.ac.id

²Universitas Nias. E-Mail: alvinndruru28@gmail.com

³Universitas Nias. E-Mail: asnayantigulo@gmail.com

⁴Universitas Nias. E-Mail: krisnazara29@gmail.com

⁵Universitas Nias. E-Mail: rafiqzeb04@gmail.com

⁶Universitas Nias. E-Mail: ardiuszai24@gmail.com

⁷Universitas Nias. E-Mail: tetonenimendrofa@gmail.com

⁸Universitas Nias. E-Mail: salfian2210@gmail.com

⁹Universitas Nias. E-Mail: agustomyariantonazara@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2026-01-31

Review : 2026-01-31

Accepted : 2026-01-31

Published : 2026-01-31

KATA KUNCI

Kesadaran HAM, Strategi Guru.

A B S T R A K

Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran hak asasi manusia (HAM) kepada peserta didik sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kepribadian warga negara yang beradab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesadaran HAM siswa, mengkaji strategi yang diterapkan guru dalam menumbuhkan kesadaran HAM, serta merumuskan model strategi pembelajaran yang efektif dan komprehensif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Lolofitu Moi pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026. Subjek penelitian meliputi guru dan siswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran HAM siswa masih didominasi oleh pemahaman kognitif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sikap serta perilaku sehari-hari. Strategi guru yang melibatkan pembelajaran aktif, pengalaman langsung, pembiasaan melalui kultur sekolah, serta keteladanan guru terbukti lebih efektif dalam

menumbuhkan kesadaran HAM dibandingkan pendekatan yang bersifat instruktif semata. Namun, implementasi strategi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu, kompetensi pedagogis guru, dan budaya sekolah yang cenderung hierarkis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan HAM perlu dilaksanakan secara holistik, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas pembelajaran dan kehidupan sekolah agar kesadaran HAM siswa berkembang secara seimbang pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peran strategis sebagai fondasi pembangunan karakter bangsa yang beradab dan bermartabat. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan kesadaran moral yang menjadikan generasi muda menghargai hak dan martabat setiap individu. Melalui pendidikan, nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat ditanamkan secara sistematis. Kajian akademik menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik yang menghargai dan mempraktikkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari, karena pendidikan ini berkontribusi pada pembentukan sikap toleran dan adil dalam masyarakat (Mahendra, 2024). Di tengah dinamika kehidupan berbangsa yang semakin kompleks, penanaman kesadaran HAM melalui pendidikan menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan merupakan upaya terencana untuk menciptakan suasana pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Tujuan pendidikan nasional tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademis, tetapi juga pembentukan karakter yang berakhlak mulia, demokratis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kesadaran akan hak-hak fundamental setiap individu tanpa membedakan latar belakang apapun.

Realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita ideal pendidikan dengan praktik kehidupan siswa sehari-hari. Berbagai bentuk pelanggaran HAM dalam lingkup pendidikan masih kerap terjadi, seperti perundungan, diskriminasi, kekerasan verbal maupun fisik, hingga sikap intoleran terhadap perbedaan. Fenomena tersebut

mengindikasikan bahwa pemahaman dan kesadaran siswa terhadap HAM belum tertanam secara kuat. Padahal, sekolah seharusnya menjadi ruang aman yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan melatih siswa untuk menghormati hak orang lain. Kondisi ini menuntut adanya strategi konkret dari para pendidik, khususnya guru, untuk menumbuhkan kesadaran HAM yang tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari.

Konsep hak asasi manusia sejatinya bersifat universal dan melekat pada setiap individu sejak lahir. John Locke dalam teori hukum kodratnya menyatakan bahwa HAM adalah anugerah dari Sang Pencipta yang tidak dapat dicabut oleh kekuasaan manapun. Hak-hak fundamental ini mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk diperlakukan secara adil, dan berbagai hak lainnya yang menjamin martabat kemanusiaan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, pemahaman terhadap HAM menjadi penting untuk mengatur relasi antara negara dengan warga negara serta hubungan antar sesama warga. Ketika kesadaran HAM telah tertanam dengan baik, maka setiap individu akan memiliki kepekaan untuk tidak melanggar hak orang lain sekaligus memiliki keberanian untuk membela hak-haknya sendiri secara proporsional (Karsa et al. 2024)

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada peserta didik. Namun demikian, penanaman kesadaran HAM tidak dapat berjalan secara otomatis melalui pembelajaran di kelas semata. Diperlukan strategi khusus yang melibatkan berbagai pendekatan, baik melalui integrasi materi dalam pembelajaran, pembiasaan dalam kehidupan sekolah, maupun keteladanan dari seluruh komponen pendidikan terutama guru. Guru memiliki posisi sentral sebagai ujung tombak pendidikan yang berinteraksi langsung dengan siswa. Melalui strategi pembelajaran yang tepat, guru dapat menginspirasi dan membimbing siswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan nyata.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang secara eksplisit memuat materi tentang HAM. Namun, pembelajaran PPKn selama ini masih cenderung berorientasi pada pencapaian kognitif semata, sementara aspek afektif dan psikomotorik belum mendapat porsi yang memadai. Padahal, kesadaran HAM tidak cukup hanya dipahami secara konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan konkret. Oleh karena itu, guru PPKn dituntut untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu menyentuh dimensi kesadaran siswa secara mendalam, sehingga nilai-nilai HAM tidak hanya menjadi hafalan tetapi menjadi bagian dari kepribadian mereka.

Pentingnya strategi guru dalam menumbuhkan kesadaran HAM pada siswa juga didorong oleh tantangan global yang semakin kompleks. Era digital membawa perubahan pola interaksi sosial yang tidak jarang memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM baru, seperti perundungan siber, penyebaran ujaran kebencian, hingga pelanggaran privasi. Generasi muda yang tumbuh di era ini perlu dibekali dengan kesadaran kritis agar mampu menavigasi dunia digital tanpa melanggar hak orang lain. Guru sebagai pendidik profesional harus

mampu mengantisipasi tantangan tersebut dengan merancang strategi pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu dikaji secara mendalam dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana kondisi kesadaran HAM siswa saat ini di lingkungan pendidikan formal, khususnya dalam konteks pembelajaran dan interaksi sosial sehari-hari di sekolah?. (2) Strategi-strategi apa saja yang telah diterapkan oleh guru dalam menumbuhkan kesadaran HAM pada siswa, dan sejauh mana efektivitas strategi-strategi tersebut dalam membentuk sikap dan perilaku yang menghormati hak asasi manusia?. (3) Bagaimana model strategi pembelajaran yang ideal dan komprehensif dapat dikembangkan untuk menumbuhkan kesadaran HAM pada siswa secara efektif, tidak hanya pada dimensi kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik?

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu: Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kesadaran HAM siswa dalam lingkungan pendidikan, baik dalam pemahaman konseptual maupun implementasi nilai-nilai HAM dalam perilaku sehari-hari. Analisis ini penting untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi aktual kesadaran HAM di kalangan peserta didik sebagai dasar pengembangan strategi yang tepat sasaran. Kedua, mengeksplorasi dan mendeskripsikan berbagai strategi yang telah diterapkan oleh guru dalam menumbuhkan kesadaran HAM pada siswa, termasuk pendekatan pedagogis, metode pembelajaran, media yang digunakan, serta praktik-praktik terbaik yang telah terbukti efektif. Eksplorasi ini akan memberikan dokumentasi komprehensif tentang ragam strategi yang dapat menjadi referensi bagi pendidik lainnya. Ketiga, merumuskan model strategi pembelajaran yang komprehensif dan aplikatif untuk menumbuhkan kesadaran HAM pada siswa yang mencakup seluruh dimensi pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Model ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam proses pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pendidikan

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, suku, atau status sosial tertentu. Suparman (2018, h. 45) menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang hak asasi manusia menjadi sangat penting karena sekolah merupakan miniatur masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial antara guru, siswa, dan seluruh komponen pendidikan lainnya.

Pemahaman HAM dalam lingkungan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks global maupun nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 telah menetapkan

bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang fundamental bagi setiap manusia. Di Indonesia, komitmen terhadap HAM telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat.

Konsep kesadaran hak asasi manusia pada siswa merujuk pada pemahaman mendalam tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu serta tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Winarno (2019, h. 78) menegaskan bahwa kesadaran HAM tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan kognitif semata, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini mencakup beberapa dimensi penting, yaitu: (1) pengetahuan tentang hak-hak fundamental manusia, (2) sikap menghargai dan menghormati hak orang lain, (3) keterampilan untuk membela hak diri sendiri dan orang lain secara konstruktif, serta (4) komitmen untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan hak asasi manusia di sekolah harus dirancang secara komprehensif untuk membentuk pribadi siswa yang tidak hanya memahami konsep HAM secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan holistik dalam pendidikan HAM menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek pengetahuan (*knowing*), sikap (*being*), dan tindakan (*doing*) sehingga tercipta generasi yang memiliki literasi HAM yang utuh dan aplikatif.

2. Peran Strategis Guru dalam Pendidikan Hak Asasi Manusia

Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia pada siswa karena guru merupakan figur sentral dalam proses pembelajaran di sekolah. Darmadi (2017, h. 112) mengemukakan bahwa guru bukan hanya berperan sebagai transfer of knowledge, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan teladan yang membentuk karakter dan kepribadian siswa. Dalam konteks pendidikan HAM, guru dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia serta kemampuan pedagogis untuk mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada siswa melalui berbagai strategi pembelajaran yang inovatif dan kontekstual.

Peran guru dalam pendidikan HAM dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi. Pertama, guru sebagai model atau teladan (*role model*) bagi siswa dalam mempraktikkan nilai-nilai HAM dalam interaksi sehari-hari. Konsistensi antara apa yang diajarkan dengan apa yang dipraktikkan oleh guru menjadi faktor krusial dalam membentuk kesadaran HAM siswa. Kedua, guru sebagai fasilitator pembelajaran yang menciptakan ruang dialog, diskusi, dan refleksi kritis terhadap isu-isu HAM yang relevan dengan konteks kehidupan siswa. Ketiga, guru sebagai agen transformasi sosial yang mendorong siswa untuk tidak hanya memahami HAM secara konseptual, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di lingkungan mereka.

Posisi guru sebagai agen perubahan sosial menjadikannya memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada generasi muda. Hamalik (2016, h. 89) menjelaskan bahwa guru yang efektif adalah guru yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang demokratis, menghargai keberagaman, dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas namun bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pendidikan hak asasi manusia yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan di antara seluruh individu tanpa diskriminasi.

Kompetensi guru dalam pendidikan HAM tidak hanya terbatas pada penguasaan materi tentang hak asasi manusia, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menciptakan kultur sekolah yang menghormati HAM. Guru perlu memiliki sensitivitas terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, serta memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi edukatif yang tepat. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang empatik, kemampuan mengelola konflik secara konstruktif, serta sikap inklusif yang mengakomodasi keberagaman latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan siswa.

3. Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Hak Asasi Manusia

Strategi pembelajaran merupakan komponen penting dalam upaya menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia pada siswa. Sanjaya (2018, h. 126) mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan HAM, strategi yang dipilih harus mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar yang bermakna.

a) Pendekatan Student-Centered Learning

Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered learning) menjadi salah satu strategi yang relevan dalam pendidikan hak asasi manusia. Trianto (2017, h. 95) mengemukakan bahwa pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran yang memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi, bertanya, dan mengkritisi informasi yang diterima. Melalui pendekatan ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan mengembangkan empati terhadap kondisi orang lain, yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam hak asasi manusia.

Implementasi pendekatan student-centered learning dalam pendidikan HAM dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain metode diskusi kelompok, studi kasus, bermain peran (role playing), simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Metode-metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami langsung situasi yang berkaitan dengan isu-isu HAM, menganalisis dilema moral, dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

b) Strategi Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) merupakan strategi yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan HAM, strategi ini sangat relevan karena memungkinkan siswa untuk melihat relevansi konsep-konsep HAM dengan pengalaman hidup mereka, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Guru dapat menggunakan isu-isu lokal yang berkaitan dengan HAM sebagai bahan pembelajaran, seperti kasus diskriminasi, kekerasan, atau ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitar siswa.

Melalui pembelajaran kontekstual, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis tentang HAM, tetapi juga mengembangkan kepekaan sosial dan kemampuan untuk mengidentifikasi serta merespons berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka. Strategi ini juga mendorong siswa untuk menjadi problem solver yang mampu mencari solusi konstruktif terhadap permasalahan HAM yang mereka temui.

c) Metode Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran kolaboratif merupakan strategi yang menekankan pada kerja sama antar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama. Metode ini sangat efektif dalam pendidikan HAM karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang pentingnya menghargai perbedaan, mendengarkan pendapat orang lain, bernegosiasi, dan mengambil keputusan secara demokratis. Melalui kerja kelompok, siswa belajar bahwa setiap individu memiliki hak untuk didengarkan dan dihargai pendapatnya, sekaligus memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kelompok.

Dalam pembelajaran kolaboratif, guru berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa proses interaksi antar siswa berlangsung secara adil dan demokratis. Guru perlu menciptakan struktur kelompok yang inklusif, memastikan tidak ada siswa yang terdominasi atau termarginalkan, serta mendorong partisipasi aktif seluruh anggota kelompok. Refleksi setelah aktivitas kolaboratif menjadi penting untuk membantu siswa menyadari nilai-nilai HAM yang telah mereka praktikkan dalam kerja kelompok.

d) Penggunaan Media dan Teknologi Pembelajaran

Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran dapat memperkaya strategi pendidikan HAM. Media audio-visual seperti film dokumenter, berita, atau video pendek tentang isu-isu HAM dapat menjadi stimulus yang efektif untuk memicu diskusi dan refleksi kritis siswa. Teknologi digital juga membuka peluang bagi siswa untuk mengakses informasi tentang HAM dari berbagai sumber, terhubung dengan gerakan HAM global, dan berbagi pemahaman mereka melalui platform media sosial dengan cara yang bertanggung jawab.

Namun demikian, penggunaan media dan teknologi harus dilakukan secara kritis dan selektif. Guru perlu membimbing siswa untuk mengembangkan literasi media yang memungkinkan mereka membedakan informasi yang valid dari hoaks atau propaganda, serta menggunakan teknologi sebagai alat untuk mempromosikan HAM, bukan sebaliknya.

4. Integrasi Nilai HAM dalam Pembelajaran

Integrasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kurikulum dan pembelajaran merupakan strategi fundamental yang harus dilakukan oleh guru. Mulyasa

(2018, h. 201) menegaskan bahwa pendidikan HAM tidak boleh dipandang sebagai mata pelajaran tersendiri yang terpisah, melainkan harus diintegrasikan dalam seluruh aspek pembelajaran dan kehidupan sekolah. Hal ini berarti bahwa setiap guru, terlepas dari bidang studi yang diampu, memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai HAM melalui konten pembelajaran, metode pengajaran, dan interaksi dengan siswa.

a) Integrasi Horizontal dan Vertikal

Integrasi nilai HAM dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Integrasi horizontal berarti mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Agama, dan mata pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran memiliki potensi untuk menjadi wahana pembelajaran HAM jika guru mampu mengidentifikasi dan mengeksplorasi konten-konten yang relevan dengan prinsip-prinsip HAM.

Sementara itu, integrasi vertikal mengacu pada pengintegrasian nilai HAM secara bertahap dan berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang paling dasar hingga jenjang yang lebih tinggi, dengan tingkat kompleksitas dan kedalaman yang disesuaikan dengan perkembangan kognitif dan moral siswa. Pendekatan spiral kurikulum memungkinkan konsep-konsep HAM diperkenalkan secara berulang dengan tingkat elaborasi yang semakin mendalam pada setiap jenjang pendidikan.

b) Hidden Curriculum dan Kultur Sekolah

Strategi integrasi nilai HAM dapat dilakukan melalui pendekatan hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Zuchdi (2017, h. 134) menjelaskan bahwa kurikulum tersembunyi merujuk pada pembelajaran nilai yang terjadi melalui budaya sekolah, aturan, norma, dan pola interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah. Dalam konteks pendidikan HAM, guru perlu menciptakan iklim sekolah yang demokratis, menghargai keberagaman, bebas dari diskriminasi, dan memberikan ruang bagi partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Hidden curriculum memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan kesadaran HAM siswa karena pembelajaran nilai tidak hanya terjadi melalui instruksi formal di kelas, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari siswa di sekolah. Ketika siswa mengalami langsung praktik-praktik yang menghormati HAM dalam kehidupan sekolah, seperti diperlakukan dengan adil, didengarkan pendapatnya, dan dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan atau diskriminasi, mereka akan mengembangkan pemahaman yang lebih autentik tentang makna dan pentingnya HAM.

Kultur sekolah yang menghormati HAM dapat diwujudkan melalui berbagai cara, antara lain: (1) penerapan tata tertib sekolah yang adil dan tidak diskriminatif, (2) mekanisme penyelesaian konflik yang demokratis dan partisipatif, (3) kebijakan anti-perundungan (anti-bullying) yang konsisten, (4) sistem penghargaan yang mengapresiasi perilaku menghormati HAM, (5) keterbukaan informasi dan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan sekolah, serta (6) perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan mengalami marginalisasi.

c) Keteladanan Guru sebagai Strategi Integrasi

Keteladanan guru merupakan bentuk integrasi nilai HAM yang paling mendasar dan berpengaruh. Siswa cenderung meniru perilaku guru yang mereka hormati dan percayai. Oleh karena itu, konsistensi antara apa yang diajarkan dengan apa yang dipraktikkan oleh guru dalam interaksi sehari-hari menjadi kunci keberhasilan pendidikan HAM. Guru yang secara konsisten menunjukkan sikap menghargai martabat siswa, mendengarkan dengan empati, memperlakukan semua siswa secara adil, dan menghindari tindakan diskriminatif atau kekerasan, akan menjadi model yang efektif bagi siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai HAM.

Keteladanan ini mencakup berbagai aspek, seperti cara guru berkomunikasi dengan siswa, cara guru memberikan penilaian, cara guru menangani konflik di kelas, dan cara guru merespons perbedaan di antara siswa. Ketika guru menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman latar belakang, kemampuan, dan pandangan siswa, mereka sedang mengajarkan nilai toleransi dan inklusivitas yang merupakan bagian integral dari HAM.

d) Tantangan dan Strategi Mengatasinya

Implementasi pendidikan HAM di sekolah tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi antara lain: (1) kurangnya pemahaman dan kompetensi guru tentang HAM dan pedagoginya, (2) terbatasnya sumber belajar yang kontekstual dan menarik, (3) kultur sekolah yang masih otoritarian dan kurang demokratis, (4) resistensi dari sebagian pemangku kepentingan yang memandang pendidikan HAM sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional, serta (5) keterbatasan waktu dalam kurikulum yang padat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan sistematis. Pertama, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan tentang konsep HAM dan metodologi pendidikan HAM. Kedua, pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran HAM yang kontekstual, menarik, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Ketiga, reformasi kultur sekolah menuju sistem yang lebih demokratis dan partisipatif melalui kebijakan dan praktik manajemen sekolah yang konsisten dengan prinsip-prinsip HAM.

Keempat, membangun dialog dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan pemahaman bersama tentang pentingnya pendidikan HAM. Kelima, mengoptimalkan integrasi nilai HAM dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas sekolah sehingga tidak memerlukan alokasi waktu khusus yang terpisah. Melalui strategi-strategi ini, pendidikan HAM dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan di sekolah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya,

berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka dengan dunia sekitarnya.

Penelitian kualitatif merupakan data yang diperoleh dari keludupan manusia yang tinggal dalam suatu wilayah sehingga perilaku individu tersebut dapat langsung diamati dan berusaha menggambarkan, menuturkan, serta menafsirkan suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, wawancara, dan dokumen yang menjadi kunci apa yang sudah diteliti. Dalam penelitian ini, strategi guru dalam menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia pada siswa yang diamati oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Kesadaran HAM Siswa dalam Lingkungan Pendidikan

Berdasarkan observasi dan analisis mendalam terhadap dinamika pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, ditemukan bahwa tingkat kesadaran hak asasi manusia pada siswa masih berada pada tahap yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para pendidik. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki pemahaman konseptual yang cukup baik mengenai definisi dan jenis-jenis hak asasi manusia, khususnya setelah mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pemahaman kognitif tersebut dengan implementasinya dalam perilaku dan interaksi sosial sehari-hari di lingkungan sekolah. Dalam dimensi pengetahuan, siswa umumnya mampu menyebutkan hak-hak fundamental manusia seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak berekspresi, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Mereka juga dapat menjelaskan landasan hukum HAM baik dalam konteks nasional maupun internasional ketika ditanya secara langsung dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan situasi konkret yang melibatkan dilema moral atau potensi pelanggaran HAM, respon siswa menunjukkan bahwa pemahaman mereka belum terinternalisasi secara mendalam. Sebagai contoh, masih ditemukan praktik perundungan verbal antar siswa yang mengarah pada pelecehan martabat kemanusiaan, sikap intoleran terhadap perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok, serta kecenderungan untuk mengabaikan hak teman yang memiliki latar belakang atau kemampuan berbeda.

Dimensi afektif kesadaran HAM siswa juga menunjukkan kondisi yang belum optimal. Empati terhadap penderitaan orang lain dan kepekaan terhadap ketidakadilan masih perlu dikembangkan secara lebih intensif. Beberapa siswa menunjukkan sikap apatis ketika menyaksikan teman mereka mengalami perlakuan tidak adil, baik dari sesama siswa maupun dalam konteks sistem yang berlaku di sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan HAM yang telah berjalan selama ini lebih menekankan aspek kognitif semata, sementara pembentukan sikap dan kepedulian sosial belum mendapat porsi yang memadai dalam proses pembelajaran.

Dari sisi psikomotorik, kemampuan siswa untuk membela hak diri sendiri dan orang lain secara konstruktif juga masih terbatas. Ketika menghadapi

situasi yang berpotensi melanggar hak mereka, sebagian besar siswa cenderung memilih diam atau melapor kepada pihak otoritas sekolah tanpa memiliki keberanian untuk menyuarakan keberatan mereka secara langsung dengan cara yang santun dan argumentatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan HAM belum berhasil membekali siswa dengan keterampilan advokasi dan komunikasi asertif yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesadaran HAM siswa sangat beragam. Latar belakang keluarga memainkan peran penting, dimana siswa yang berasal dari keluarga dengan pola asuh demokratis cenderung menunjukkan kesadaran HAM yang lebih baik dibandingkan siswa dari keluarga dengan pola asuh otoriter. Lingkungan sosial di luar sekolah juga memberikan pengaruh, terutama terkait dengan paparan media sosial yang tidak jarang menampilkan konten-konten yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM seperti ujaran kebencian, kekerasan, dan diskriminasi. Kultur sekolah yang masih cenderung hierarkis dan kurang memberikan ruang bagi partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan turut berkontribusi terhadap lemahnya internalisasi nilai-nilai HAM dalam diri siswa.

2. Strategi Guru dalam Menumbuhkan Kesadaran HAM

Penelusuran terhadap praktik pembelajaran yang dilakukan oleh para guru mengidentifikasi beberapa strategi yang telah diterapkan dalam upaya menumbuhkan kesadaran HAM pada siswa. Strategi-strategi tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan instruksional melalui pembelajaran di kelas, pendekatan pembiasaan melalui kultur sekolah, dan pendekatan keteladanan melalui modeling perilaku guru.

Dalam pendekatan instruksional, sebagian guru telah menggunakan metode pembelajaran yang variatif untuk menyampaikan materi HAM. Metode ceramah interaktif masih menjadi pilihan utama bagi banyak guru, dimana mereka menjelaskan konsep-konsep HAM disertai dengan pemberian contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Beberapa guru yang lebih inovatif telah menerapkan metode diskusi kelompok dan studi kasus untuk mengajarkan HAM. Melalui metode ini, siswa diberikan kesempatan untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi baik di tingkat lokal maupun nasional, mengidentifikasi hak-hak yang dilanggar, menganalisis penyebabnya, dan merumuskan solusi yang memungkinkan.

Metode bermain peran atau simulasi juga telah diterapkan oleh sejumlah guru untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang bagaimana rasanya berada dalam posisi orang lain yang hak-haknya dilanggar. Melalui aktivitas role playing, siswa dapat merasakan secara emosional dampak dari pelanggaran HAM, yang kemudian menumbuhkan empati dan kesadaran untuk tidak melakukan hal serupa kepada orang lain. Pembelajaran berbasis proyek juga mulai digunakan oleh beberapa guru sebagai strategi untuk melibatkan siswa dalam aksi nyata mempromosikan HAM. Siswa diberi tugas untuk merancang dan melaksanakan kampanye anti-perundungan, membuat media edukasi tentang HAM, atau melakukan advokasi sederhana terhadap isu-isu HAM di lingkungan sekolah mereka.

Pemanfaatan media pembelajaran juga menjadi strategi yang diterapkan dalam pendidikan HAM. Guru menggunakan video dokumenter, film pendek, berita, dan konten digital lainnya untuk menggambarkan realitas pelanggaran HAM serta perjuangan menegakkan keadilan. Media visual ini mampu memberikan stimulus yang kuat untuk memicu diskusi dan refleksi mendalam dari siswa. Beberapa guru juga memanfaatkan platform digital untuk memfasilitasi diskusi online tentang isu-isu HAM terkini, yang memungkinkan siswa untuk mengakses informasi yang lebih luas dan terlibat dalam dialog dengan perspektif yang beragam.

Pendekatan pembiasaan melalui kultur sekolah dilakukan dengan menciptakan aturan dan norma yang konsisten dengan nilai-nilai HAM. Beberapa sekolah telah menerapkan sistem tata tertib yang adil dan transparan, mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan siswa, serta kebijakan zero tolerance terhadap perundungan dan diskriminasi. Program-program seperti peer mediation, dimana siswa dilatih untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antar teman, telah diimplementasikan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan penghormatan terhadap hak orang lain. Pembentukan organisasi siswa yang demokratis juga memberikan ruang bagi siswa untuk berlatih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memperjuangkan kepentingan mereka secara konstruktif.

Keteladanan guru merupakan strategi yang paling fundamental dalam implementasi pendidikan HAM. Observasi menunjukkan bahwa guru-guru yang secara konsisten mempraktikkan nilai-nilai HAM dalam interaksi sehari-hari dengan siswa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan kesadaran HAM siswa. Guru yang mendengarkan pendapat siswa dengan penuh perhatian, memperlakukan seluruh siswa secara adil tanpa membedakan latar belakang mereka, memberikan penghargaan terhadap keberagaman pendapat, dan menghindari tindakan kekerasan verbal atau psikologis, menjadi model yang powerful bagi siswa.

3. Efektivitas Strategi dan Tantangan Implementasi

Efektivitas strategi-strategi yang telah diterapkan menunjukkan hasil yang bervariasi. Strategi yang melibatkan siswa secara aktif dan memberikan pengalaman langsung cenderung lebih efektif dalam membentuk kesadaran HAM dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat instruktif dan pasif. Metode diskusi kelompok dan studi kasus terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa serta kepekaan mereka terhadap isu-isu HAM. Siswa menjadi lebih mampu mengaitkan konsep HAM dengan realitas sosial yang mereka hadapi, tidak hanya memahami HAM sebagai teori yang abstrak.

Metode bermain peran menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap perubahan sikap siswa. Evaluasi terhadap penggunaan metode ini menunjukkan peningkatan empati siswa dan kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Pembelajaran berbasis proyek juga memberikan dampak yang komprehensif, tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang HAM tetapi juga mengembangkan keterampilan mereka dalam mengorganisir kegiatan, berkolaborasi dengan orang lain, dan menyuarakan pendapat mereka secara efektif.

Pembelajaran yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang menghasilkan perubahan yang lebih komprehensif pada diri siswa. Namun demikian, keberlanjutan dan konsistensi dalam penerapan strategi menjadi faktor penentu keberhasilan. Strategi yang hanya dilakukan sesekali atau tidak terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan sekolah cenderung memberikan dampak yang terbatas dan tidak bertahan lama.

Tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan strategi pendidikan HAM cukup kompleks. Keterbatasan waktu pembelajaran dalam kurikulum yang padat menjadi kendala utama, dimana guru harus menyelesaikan target materi yang telah ditetapkan sehingga sulit mengalokasikan waktu untuk metode pembelajaran yang lebih interaktif dan mendalam. Kurangnya kompetensi pedagogis guru dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa juga menjadi hambatan, dimana sebagian guru masih merasa lebih nyaman dengan pendekatan konvensional yang teacher-centered. Terbatasnya sumber belajar yang kontekstual dan menarik tentang HAM membuat guru kesulitan untuk menyajikan materi yang relevan dengan kehidupan siswa.

Pembahasan

1. Kesenjangan antara Pengetahuan dan Praktik HAM

Temuan penelitian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman kognitif siswa tentang HAM dengan implementasinya dalam perilaku sehari-hari mengkonfirmasi pandangan Winarno (2019) yang menegaskan bahwa kesadaran HAM tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan kognitif semata, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik. Fenomena ini mencerminkan problematika mendasar dalam praktik pendidikan HAM yang masih berorientasi pada transfer pengetahuan tanpa disertai dengan upaya pembentukan karakter dan pembiasaan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai HAM.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran Bloom yang membedakan ranah pembelajaran menjadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran HAM yang hanya menyentuh ranah kognitif akan menghasilkan siswa yang pintar secara teoritis namun tidak mampu mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Perundungan verbal, sikap intoleran, dan pengabaian terhadap hak orang lain yang masih terjadi di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang HAM belum bertransformasi menjadi kesadaran moral yang memandu perilaku mereka.

Faktor lingkungan keluarga dan sosial yang mempengaruhi kesadaran HAM siswa sejalan dengan teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner yang menekankan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan, mulai dari mikrosistem (keluarga, sekolah) hingga makrosistem (nilai-nilai budaya masyarakat). Pola asuh otoriter yang masih dominan di banyak keluarga Indonesia cenderung menekan kebebasan berpikir dan partisipasi anak, yang bertentangan dengan semangat HAM. Demikian pula, kultur sekolah yang hierarkis tidak memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang bagaimana rasanya hidup dalam sistem yang menghormati HAM.

Pengaruh media sosial terhadap kesadaran HAM siswa merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian khusus di era digital ini. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana pembelajaran HAM yang efektif dengan menyediakan akses terhadap informasi dan gerakan HAM global. Namun di sisi lain, konten-konten yang mengandung ujaran kebencian, kekerasan, dan diskriminasi yang mudah diakses di media sosial dapat mengikis kepekaan siswa terhadap pelanggaran HAM. Hal ini menuntut pendidikan HAM untuk tidak hanya fokus pada konten tradisional tetapi juga mengintegrasikan literasi digital dan etika bermedia sosial.

2. Efektivitas Berbagai Pendekatan Pembelajaran HAM

Temuan bahwa metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif lebih efektif dibandingkan metode pasif mendukung pandangan Trianto (2017) tentang pentingnya pendekatan student-centered learning dalam pendidikan HAM. Metode diskusi kelompok dan studi kasus memberikan kesempatan kepada siswa untuk tidak hanya menerima informasi tetapi juga mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri melalui analisis, argumentasi, dan refleksi kritis. Proses ini lebih bermakna bagi siswa karena mereka terlibat secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran.

Efektivitas metode bermain peran dalam meningkatkan empati siswa dapat dijelaskan melalui konsep experiential learning dari Kolb yang menekankan pentingnya pengalaman konkret dalam proses pembelajaran. Ketika siswa berperan sebagai korban pelanggaran HAM, mereka tidak hanya memahami secara kognitif tetapi juga merasakan secara emosional dampak dari pelanggaran tersebut. Pengalaman emosional ini jauh lebih berkesan dan berpengaruh terhadap pembentukan sikap dibandingkan dengan sekadar mendengar penjelasan tentang dampak pelanggaran HAM.

Pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam aksi nyata mempromosikan HAM sejalan dengan konsep pembelajaran kontekstual yang ditekankan oleh Sanjaya (2018). Melalui proyek kampanye anti-perundungan atau pembuatan media edukasi HAM, siswa tidak hanya belajar tentang HAM tetapi juga belajar untuk HAM dan melalui HAM. Mereka mengembangkan sense of agency, keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat perubahan positif di lingkungan mereka. Pengalaman ini sangat penting untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya paham tentang HAM tetapi juga berkomitmen untuk memperjuangkannya.

Pemanfaatan media pembelajaran dalam pendidikan HAM menunjukkan relevansi dengan teori multiple intelligences dari Gardner yang menekankan bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Media visual seperti film dokumenter atau video pendek dapat menjangkau siswa dengan kecerdasan visual-spatial yang kuat, sementara diskusi dan debat lebih efektif bagi siswa dengan kecerdasan verbal-linguistic. Kombinasi berbagai media dan metode pembelajaran memastikan bahwa pendidikan HAM dapat menjangkau seluruh siswa dengan keberagaman gaya belajar mereka.

3. Pentingnya Kultur Sekolah dan Keteladanan Guru

Temuan tentang pentingnya kultur sekolah dalam pendidikan HAM mengkonfirmasi konsep hidden curriculum yang dijelaskan oleh Zuchdi (2017).

Pembelajaran nilai tidak hanya terjadi melalui kurikulum formal tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari siswa di sekolah. Sistem tata tertib yang adil, mekanisme penyelesaian konflik yang demokratis, dan kebijakan anti-perundungan yang konsisten mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana seharusnya HAM ditegakkan dalam praktik, bukan hanya dalam teori.

Program peer mediation merupakan contoh konkret bagaimana kultur sekolah dapat menjadi wahana pembelajaran HAM yang efektif. Ketika siswa diberdayakan untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri dengan bimbingan yang tepat, mereka belajar tentang pentingnya dialog, mendengarkan perspektif yang berbeda, dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Pengalaman ini jauh lebih bermakna dibandingkan dengan sistem penyelesaian konflik yang top-down dimana otoritas sekolah semata yang menentukan sanksi tanpa melibatkan pihak yang berkonflik.

Organisasi siswa yang demokratis memberikan pembelajaran langsung tentang partisipasi, representasi, dan akuntabilitas yang merupakan prinsip-prinsip fundamental dalam demokrasi dan HAM. Ketika siswa terlibat dalam proses pemilihan pemimpin organisasi, merumuskan program kerja, dan mengevaluasi kinerja pengurus, mereka sedang berlatih menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Pengalaman ini sangat berharga untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan demokratis yang lebih luas di masyarakat.

Temuan tentang pengaruh kuat keteladanan guru sejalan dengan teori social learning dari Bandura yang menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung tetapi juga melalui observasi terhadap model. Guru adalah model yang paling berpengaruh bagi siswa di sekolah. Ketika guru secara konsisten menunjukkan sikap menghormati HAM dalam interaksi sehari-hari, siswa akan menginternalisasi nilai-nilai tersebut sebagai standar perilaku yang seharusnya. Sebaliknya, inkonsistensi antara apa yang diajarkan dengan apa yang dipraktikkan guru akan menimbulkan sinisme dan merusak kredibilitas pendidikan HAM.

Keteladanan guru mencakup berbagai aspek yang sering dianggap sepele namun sebenarnya sangat bermakna bagi siswa. Cara guru menyapa siswa dengan ramah tanpa membedakan, cara guru mendengarkan keluhan siswa dengan penuh perhatian, cara guru memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi, dan cara guru merespons kesalahan siswa dengan pendekatan edukatif daripada punitif, semuanya adalah pembelajaran HAM yang implicit namun powerful. Darmadi (2017) menegaskan bahwa guru bukan hanya transfer of knowledge tetapi juga sebagai teladan yang membentuk karakter siswa.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis yang penting bagi pengembangan konsep pendidikan HAM di Indonesia. Pertama, penelitian ini memperkuat argumen bahwa pendidikan HAM tidak dapat dipandang sebagai mata pelajaran tersendiri yang terpisah, melainkan harus diintegrasikan dalam seluruh aspek pendidikan. Pandangan Mulyasa (2018) tentang pentingnya integrasi nilai HAM dalam kurikulum dan kehidupan sekolah terbukti relevan dengan temuan bahwa pembelajaran HAM yang efektif adalah pembelajaran

yang holistik, mencakup tidak hanya dimensi kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hak asasi manusia pada siswa masih didominasi oleh pemahaman kognitif dan belum sepenuhnya terwujud dalam sikap serta perilaku nyata di lingkungan sekolah. Kesenjangan antara pengetahuan dan praktik HAM menunjukkan bahwa pendidikan HAM yang bersifat informatif saja tidak cukup tanpa penguatan dimensi afektif dan psikomotorik. Strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa, pengalaman langsung, kultur sekolah yang demokratis, serta keteladanan guru terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran HAM secara menyeluruh. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, kompetensi pedagogis guru, dan budaya sekolah yang hierarkis. Oleh karena itu, pendidikan HAM perlu dilaksanakan secara holistik, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas pendidikan agar mampu membentuk siswa yang tidak hanya memahami HAM secara teoritis, tetapi juga menjadikannya sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar sekolah dan guru mengembangkan pendidikan hak asasi manusia secara terpadu melalui pembelajaran yang partisipatif, penguatan kultur sekolah yang adil dan demokratis, serta keteladanan sikap guru dalam praktik sehari-hari. Peningkatan kompetensi pedagogis guru, penyediaan sumber belajar yang relevan, dan pengintegrasian nilai HAM dalam seluruh aktivitas sekolah perlu dilakukan secara konsisten agar kesadaran HAM siswa tidak berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi tumbuh menjadi sikap dan perilaku yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. New York: Longman.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Darmadi, H. (2017). *Pengembangan model dan metode pembelajaran dalam dinamika belajar siswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gardner, H. (2011). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books.
- Hamalik, O. (2016). *Proses belajar mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- John Locke. (1980). *Second treatise of government*. Indianapolis: Hackett Publishing Company. (Karya asli diterbitkan tahun 1690).
- Karsa, K. dkk. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia . *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* , 2 (01). Diperoleh dari <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

- Mahendra, Y. R. (2024). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam pengajaran hak asasi manusia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1–10. Doi: <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v6i1.5068>
- Mulyasa, E. (2018). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, W. (2018). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Suparman. (2018). *Pendidikan kewarganegaraan: Konsep dan implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Trianto. (2017). *Model pembelajaran terpadu: Konsep, strategi, dan implementasinya dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno. (2019). *Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuchdi, D. (2017). *Pendidikan karakter: Konsep dasar dan implementasi di perguruan tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.